ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2808-1854
p-ISSN : 2808-2346

Terindeks : Garuda, Google Scholar, Moraref, Base, dan OneSearch.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN STRATEGI MELAWAN RADIKALISASI KEKERASAN DI SPANYOL

Ani Ramayanti
Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung
aniramayanti212@gmail.com

Abstract

Spain's public schools need Islamic religious education to prevent terrorism. This is because many children in Spain's schools are Muslim, which means they need to be educated about Islamic religious ideas. This is why Spain passed a law for Islamic religious education in public schools. They also passed new legislation that emphasized adaght against Islamic terrorism. These laws gave teachers of Islamic Education a significant role in countering Islamic terrorist messages and preventing violent radicalization.

Keywords: *Islamic Religious Education; radicalization; terrorism; Spanish*

Abstrak : Artikel ini menganalisis pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum di Spanyol sebagai instrumen dalam pencegahan dan adaght melawan radikalisasi kekerasan. Dalam artikel ini, kami Resensi keadaan hukum Pendidikan agama Islam dan peraturan terbaru tentang pendidikan Agama Islam yang menekankan adaght terhadap terorisme Islam. Kami juga mempelajari peraturan Guru pendidikan Agama Islam dan peran mereka dalam kontra-narasi yang diperlukan untuk mencegah pesan teroris Islam dan mencegah radikalisasi kekerasan.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam; radikalisasi; terorisme; Spanyol

PENDAHULUAN

Rencana strategis Nasional melawan radikalisasi kekerasan di Spanyol disahkan pada Pertemuan Kabinet yang diadakan pada 30 Januari 2015. Rencana itu dipublikasikan dalam presentasi singkat Power Point yang menunjukkan fakta bahwa radikalisasi kekerasan terkait dengan terorisme Islam (Croissant & Barlow, 2007). Dokumen tersebut secara harfiah menyatakan: 'Terlepas dari kenyataan bahwa Rencana ini berorientasi pada semua jenis

Jurnal Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

radikalisasi kekerasan, tidak ada keraguan bahwa ancaman utama saat ini berasal dari terorisme jihadis'. Dengan kata lain, seperti yang disimpulkan oleh Pemerintah Inggris dalam Prevent Review, 'Strategi harus terus fokus pada radikalisasi yang terkait dengan ancaman teroris utama yang dihadapi Inggris, dari group yang biasanya secara kolektif disebut sebagai fundamentalis Islam (Kosmynka, 2021).

Pentingnya faktor agama dan kebebasan beragama juga disorot dalam presentation rencana Spanyol melawan radikalisasi kekerasan. Bahkan, dari tiga contoh yang disebutkan dalam rencana tersebut, dua di antaranya terkait dengan penutupan pemakaman Muslim dan pemindahan masjid ke pinggiran kota. Peran penting telah ditugaskan ke Observatorium Pluralisme Agama dan Yayasan Pluralisme dan Kohabitasi, sebagai bagian dari struktur organisasi dan operasi rencana tersebut. Strategi Inggris disebut 'Kontes' defines radikalisasi sebagai berikut: 'radikalisasi adalah proses di mana orang datang untuk mendukung ekstremisme kekerasan dan, dalam beberapa kasus, bergabung dengan kelompok teroris. Komisi Eropa mendefinisikan radikalisasi sebagai 'fenomena orang-orang yang merangkul pendapat, pandangan dan gagasan, yang dapat mengarah pada terorisme'. Sebuah laporan tahun 2008 oleh Kelompok Ahli Komisi Eropa tentang Radikalisasi Kekerasan menunjukkan bahwa radikalisasi dapat dianggap sebagai sosialisasi terhadap ekstremisme, yang dapat mengarah pada terorisme. Istilah 'radikalisasi' tidaksecara de fi ned konsisten. Fundamentalisme agama, seringkali menjadi inti dari radikalisasi, dapat diartikan sebagai keyakinan akan kebenaran agama mutlak yang harus dicermati saat ini dalam dengan cara yang sama seperti di masa lalu. 'Ekstremisme' dikaitkan dengan adopsi aktif suatu ideologi, dengan maksud sengaja menggunakan kekerasan untuk merusak struktur negara (Pape, 2003).

Selain itu, Spanish Official State Journal (BOE) menerbitkan resolusi oleh Direktorat Jenderal untuk Penilaian dan Kerja Sama Teritorial tertanggal 14 Maret 2016. Resolusi tersebut berisi kurikulum agama Islam untuk pendidikan menengah dan sekolah menengah atas. Ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan Islam dalam mencegah terorisme kekerasan dan melawan radi- kalisasi kekerasan. Resolusi tersebut juga secara tegas menyebutkan rencana strategis Nasional melawan radikalisasi kekerasan. Strategi dan rencana aksi Uni Eropa untuk memerangi terorisme yang diadopsi pada November 2005 menetapkan empat pilar untuk melawan terorisme: pencegahan, perlindungan, pengejaran, dan respons. Pilar fi rst, pencegahan, ditujukan untuk mencegah orang menjadi teroris. Untuk melakukannya, ia deals dengan faktor atau penyebab utama yang mengarah pada radikalisasi dan rekrutmen. Kita tidak boleh mengabaikan keberadaan masalah sosial-politik, yang

berdampak pada pelaku serangan teroris (Pape, 2003), tetapi banyak penulis juga menyoroti faktor agama untuk sepenuhnya memahami fenomena terorisme Islam(Croissant & Barlow, 2007). Inilah konteks di mana peran pendidikan agama Islam berlaku. Namun, kita tidak bisa cukup naif untuk mengharapkan pendidikan agama menjadi satu-satunya cara untuk melawan terorisme Islam atau serangandi masa depan, tetapi dalam fight melawan terorisme ini, semuanya penting.

Dengan latar belakang ini, makalah kami bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya pendidikan agama Islam dalam pencegahan dan fight terhadap radikalisasi kekerasan. Lebih lanjut, pakar Amerika dalam kontra-terorisme Marc Sageman (2008) berpendapat bahwa teroris Islamis terbuka untuk persuasi karena mereka belum menerima pendidikan tentang Islam atau natur Islam. Dengan demikian, akan bermanfaatbagikaum muda untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik tentang Islam. Seorang pendidik Muslim, A. Sahin (2016a), mengatakan: 'kita perlu menantang praktik-praktik indok, termasuk yang ada di Internet. Kita perlu membekali kaum muda Muslim dengan literasi Islam yang mengintegrasikan keterampilan berpikir reflektif dan pemahaman antarbudaya untuk membantu mereka terlibat secara cerdas dan kontradiktif dengan warisan iman mereka dan masyarakat yang lebih luas.

Sayangnya, sejauh ini baik komunitas Muslim maupun pembuat kebijakan pendidikan belum menunjukkan minat untuk mengembangkan model pendidikan alternatif semacam itu'. Spanyol bisa menjadi tempat pengujian yang bagus. Pendidikan Islam di sekolah-sekolah negeri Spanyol memperoleh relevansikhusus dalam memerangi terorisme dan mencegah radikalisasi kaum muda (Wainscott, 2015). Ini adalah ide utama di balik pekerjaan ini. Serangan Catalonia pada Agustus 2017 juga berkonsekuensi pada radikalisasi kaum muda jihadis yang belum mengenyam pendidikan Islam di sekolah umum (Wainscott, 2015).

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah lebih baik bagi siswa Muslim untuk menerima pendidikan agama Islam di sekolah umum , atau di madrasah (sekolah Muslim) atau dari kelompok Islam secara online, untuk mencegah terorisme jihadis dan radikalisasi Islam . Isu yang paling penting adalah bagaimana pendidikan agama Islam disediakan dan agar pendidikan agama Islam di sekolah umum kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak human. Sekolah umum tidak dapat mempromosikan pendidikan agama Islam seperti yang dilakukan Taliban atau kelompok fundamentalis. Pada prinsipnya,

negara dan masyarakat masih khawatird bahwa anak-anak Muslim di negara-negara Eropa tidak boleh dibesarkan tanpa pendidikan agama atau dengan sikap Islam radikal kadang-kadang dibimbing oleh imam impor tanpa pengetahuan tentang bahasa dan budaya'. Küng menganggap pendidikan agama Islam sangat penting untuk integrasi Muslim ke dalam masyarakat Eropa. Y. Waghid (2009) menulis Pemerintah Inggris, bagaimanapun, berpandangan bahwa madrasah tidak cukup proaktif dalam menanamkan nilai-nilai yang akan mempromosikan integrasi dan partisipasi dalam masalah kepemilikan dan kewarganegaraan tetapi tidak lihat hubungan langsung dengan terorisme. Selain itu, ada persepsi yang kuat bahwa madrasah adalah tempat di mana fundamentalis Islam diajarkan jenis Islam radikal yang bertentangan dengan Barat. Kerangka hukum pendidikan Islam yang ada di Spanyol digunakan untuk memfokuskan subjek dan kemudian menganalisis status hukum para guru. Sebagai kesimpulan, tulisan ini membahas pentingnya pendidikan agama non-pengakuan dalam field ini dan dalam pendidikan antarbudaya (Saada & Gross, 2019).

METODE

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber deskripsi yang luas dan dapat didasarkan pada sudut pandang yang kuat, serta dapat berisi penjelasan tentang semua proses yang terjadi di lingkungan setempat. Data yang diperoleh secara kualitatif dapat memahami dan melacak peristiwa k secara kronologis, dan mengukur kausalitas dalam pendapat orang-orang di sekitar mereka. Jenis penelitian ini cocok untuk mengkaji kondisi objektif objek penelitian, sehingga metode dan prosedur yang dilakukan dari luar dandalam menjadi bagian dari penelitian kualitatif yang harus dilakukan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumen. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007), Analisis data adalah pekerjaan yang dilakukan melalui cara kerja data, kemudian data diatur, diklasifikasikan, dan dipilih ke dalam unit yang dapat dikelola untuk menemukan dan menemukan pola untuk ditangani. Lakukan sintesis dan pencarian. Pertanyaan penting dan dipelajari, dan memutuskan konten apa yang dapat diterapkan pada orang lain. Secara singkat, teknik analisis data penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu mereduksi data , menyajikan data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Pendidikan Agama Islam Di Spanyol

Di Spanyol, pendidikan agama di sekolah umum adalah pengakuan. Pendidikan agama diajarkan oleh agama, tetapi hanya mereka yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Spanyol. Agama-agama dengan perjanjian kerja sama adalah Gereja Katolik, pengakuan Injili, komunitas Yahudi dan komunitas Muslim (Seglers Gómez-Quintero 2004). Perjanjian Kerja Sama dengan komunitas Muslim ditandatangani pada tahun 1992. Komisi Islam Spanyol (CIE) officially mewakili Muslim Spanyol di hadapan Pemerintah Spanyol. CIE mengoordinasikan dua asosiasi Muslim utama Spanyol, Federasi Islam Entitas Keagamaan Spanyol (FEERI) dan Persatuan Komunitas Islam di Spanyol (UCIDE). Namun, karena ketidaksepakatan antara kedua asosiasi, UCIDE memimpin sekelompok federasi Islam yang lebih kecil yang memisahkan diri dari CIE dan membentuk Dewan Islam Spanyol pada April 2011. Ada sekitar 1500 masjid di Spanyol dan 1600 jemaah Muslim terdaftar di Spanyol. Pemerintah Spanyol memperkirakan ada dua juta Muslim di negara itu. Apakahlam sangat jamak di Spanyol; itu bukan monolit.

Peraturan tentang pendidikan Islam di sekolah negeri dan sekolah binaan negara (yang ideologinya tidak sesuai dengan pendidikan agama Islam) memungkinkan siswa atau orang tua mereka untuk memilih subjek. Isi kursus dan buku teks dicegah oleh Komisi Islam Spanyol. Komisi juga menunjuk guru, yang direkrut dan dibayar oleh administrasi publik jika setidaknya 10 siswa telah memilih mata pelajaran di sekolah. Dengan LOMCE, Undang-Undang Pendidikan Spanyol saat ini tahun 2013 (Peningkatan Undang-Undang Kualitas Pendidikan), mata pelajaran ini telah menjadi bagian dari kurikulum dan juga dinilai. Ada perbandingan akademik dan kurikuler antara mata pelajaran pendidikan agama dan semua mata pelajaran lainnya. Siswa yang tidak memilih pendidikan religiharus mempelajari mata pelajaran wajib yang disebut: 'nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan'. Otoritas agama bertanggung jawab untuk menetapkan standar pembelajaran yang dievaluasi, sesuai dengan peraturan pendidikan agama Islam. Singkatnya, peraturan pendidikan agama di sekolah umum yang mengatur agama dengan perjanjian kerja sama (Katolik, Evangelis, Yahudi dan Muslim) sangat mirip (Saada & Gross, 2019).

Berkenaan dengan isi mata pelajaran agama Islam di sekolah umum seperti halnya agama Katolik dan agama Injili, menurut putusan Mahkamah Konstitusi 38/2007 tanggal 17 Februari 2007, subjeknya adalah pengakuan dan dimaksudkan untuk mengembangkan iman

siswa yang adalah orang percaya. Oleh karena itu , isi kursus secara defined sesuai dengan keyakinan agama. Misalnya, Orde 11 Januari 1996 yang mengatur penerbitan kurikulum pendidikan Islam untuk pendidikan dasar menengah dan sekolah menengah menetapkan tujuan utama pendidikan Islam sebagai 'untuk menanamkan iman kepada Tuhan. Resolusi tertanggal 26 November 2014 meliputi: 'Untuk belajar dan menanamkan iman kepada Allah, Pencipta Alam Semesta, dari semua makhluk hidup dan satu-satunya Tuhan yang disembah.

Mahkamah Konstitusi Spanyol telah memutuskan bahwa tujuan pendidikan agama tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga bagi guru untuk menyampaikan keyakinan agama dan, atas dasar hukum ini, menarik serangkaian kesimpulan, seperti iman yang tunduk pada pelajaran harus defined oleh gereja, komunitas, atau otoritas pengakuan yang sesuai'. Prinsip pemisahan antara Negara dan Gereja 'melarang segala jenis kebingungan antara fungsi agama dan Negara ', yang berarti bahwa Negara tidak dapat menentukan isi dari subjek ini Penolakan terhadap terorisme dan pencegahan radikalisasi juga termasuk dalam mata pelajaran ini (pendidikan agama Islam). Khususnya, resolut ion tentang pendidikan Islam di sekolah dasar sekolah (26 November 2014) menetapkan bahwa tujuan akhir dari mata pelajaran ini adalah untuk menyediakan alat untuk sepenuhnya mengembangkan kemampuan siswa, bersama dengan bidang studi lainnya. Fikih pendidikanIslam adalah berkontribusi pada kemampuan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, yang sah, esensial, dan cocok untuk koeksistensi demokratis. Di antara item lintas disiplin yang disebutkan dalam resolusi pendidikan dasar adalah penolakan terhadap kekerasan teroris. Namun, Resolusi yang menentukan kurikulum mata pelajaran agama Islam di pendidikan SMP dan SMA (14 Maret 2016) lebih penting. Pada tingkat pendidikan ini, penolakan terhadap kekerasan teroris dan penyelesaian perselisihan secara damai dalam semua aspek kehidupan sosial dan pribadi juga dimasukkan sebagai masalah lintas disiplin. Isi subjek agama Islam telah dibagi menjadi beberapa unit pedagogis. Unit kedua disebut: 'Kesucian, martabat, dan kebebasan manusia'. Tujuan utama dari unit ini adalah untuk mempromosikan dan menanggapi kebutuhan sosial. Ini harus memberi siswa sarana untuk menyadari, memprediksi, mendeteksi, dan mencegah semua jenis kekerasan, terutama kekerasanteroris. Konten terkait terorisme dibahas secara rinci di tahun keempat sekolah menengah. Silabusnya adalah sebagai berikut: 'Terorisme. Fase kesadaran, prediksi dan deteksi: di luar subjek, di dalam orang, kesengajaan dan penerimaan kriminalitas ekspresif; Pencegahan. Penolakan terhadap kekerasan teroris'. Standar pembelajaran yang dinilai dalam artikel ini meliputi:

Pengetahuan, analisis, diskusi dan penilaian radikalisasi kekerasan; Mendefinisikan terorisme, menyadari kerusakan pada korbannya dan pelanggaran nilai dan prinsip yang nyata; Deskripsi dan analisis aspek pendidikan, pencegahan, dan jejaring sosial dari 'Rencana strategis nasional melawan radikalisasi kekerasan', mencapai hasil yang lebih baik dalam strategi deteksi (Franken, 2019).

Untuk meringkas, lampiran resolusi menyatakan bahwa studi agama Islam di sekolah menengah ditujukan untuk: 'kaum muda menjadi prihatin dan mengekspresikan penolakan mereka terhadap funda- mentalisme yang dihasilkan dari lingkungan fanatik dan konversi emosional, di mana radikalisasi dan ekstremisme kekerasan menjadi bagian dari, karena pengetahuan yang diperoleh di kelas tidak akan cukup untukmencegah dampaknya. Subjek harus memiliki peran preventif, karena akan membantu mendeteksi dan mengurangi risiko memperoleh kesalahpahaman tentang Islam'. Peran preventif ini sangat penting dalam melawan radikalisasi. Dengan kata lain, pendidikan Islam niscaya akan menjadi instrumen ektif untuk melawan penyebaran pesan teroris Islam. Islam menolak terorisme Islam dan Muslim (guru agama Islam) dengan tegas mengomunikasikan gagasan ini. Tujuan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum yang digagasoleh Pemerintah Spanyol dan komunitas Muslim di Spanyol adalah untuk menyajikan penggambaran Islam yang menolak terorisme.

Islam kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi percaya kita akan melihat bahwa tradisi pemikiran politik Islam mengandung kemungkinan praktis yang interpretatif yang dapat berkembang menjadi sistem demokrasi. demokrasi adalah sistem yang tepat bagi Islam karena mengekspresikan nilai khusus manusia'. Mahasiswa muslim harus menyadari hal ini, memilikipengetahuan yang baik dan juga membagikannya, karena hakikat pendidikan agama adalah pengakuan, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Spanyol 38/2007. Tujuan utama pendidikan agama Islam adalah untuk mencegah masuknya orang-orang muda dari pesan teroris Islam, yang tersedia untuk yang lebih besar atau tingkat yang lebih rendah di Internet dan jejaring sosial. Pendidikan agama Islam ini dapat membantu mencegah perkembangan bentuk-bentuk Islam ekstremis. Terakhir, penyebutan juga harus dibuat dari bayangan gelap yang menggantung di atas subjek pendidikan agama Islam. Saya merujuk pada fakta bahwa pembagian pendapat tentang Islam di Spanyol kembali terjadi. Secara khusus, resolusi terakhir tentang kurikulum kursus telah dikritik oleh Federasi Islam Entitas Keagamaan Spanyol (FEERI). Kritikberfokus pada kurangnya informasi

dan konsultasi awal mengenai konten subjek. Tidak ada informasi yang diberikan oleh Ketua sementara Komisi Islam Spanyol, Tuan Tatary, maupun Spanyol.

Pemerintah. Akibatnya, Federasi Islam mengklaim bahwa mereka tidak merasa terwakili atau berkewajiban oleh tindakan Tuan Tatary. Komisi Islam Spanyol menanggapi kritik ini dengan sebuah pernyataan yang diterbitkan pada 30 Maret 2016, menunjukkan bahwa hanya 9 dari 37 federasi Islam yang terbentuk bagian dari Komisi Islam Spanyol telah menolak tindakan ini. Bagaimanapun, itu juga meminta maaf atas perasaan buruk yang mungkin ditimbulkannya. Pernyataan itu juga menyoroti fakta bahwa kurikulum tersebut adalah hasil gabungandari sejumlah besar profesional dan pakar Muslim yang bekerja dengan dukungan mayoritas federasidan komunitas agama di Spanyol. Banyak perhatian diambil untuk menjaga pekerjaan terlepas dari campur tangan politik atau opini dan untuk melindunginya dari eksternal yang tidak pantas dalam kelancaran, seperti yang dinyatakan dalam teks. Diharapkan progress penting ini tidak terhambat dalam penerapannya oleh perbedaan antara dua pendekatan atau perspektif Islam yang berbeda yang saat ini ada di Spanyol.

Status Hukum Para Guru Pendidikan Agama Islam Di Spanyol

Status hukum guru pendidikan agama Islam di Spanyol diatur oleh ketentuan tambahan tiga dari Undang-Undang Pendidikan. Ketentuan ini mencantumkan aspek-aspek utama dari undang-undang guru pendidikan agama Katolik, Injili dan Islam: pemilihan guru oleh otoritas agama; rekrutmen oleh administrasi pendidikan publik; perpanjangan tahunan otomatis dan, sebagaimana kasusnya, pemecatan sesuai dengan undang-undang saat ini. Status hukum guru pendidikan agama (agama Katolik, Evangelik dan Islam) ditetapkan oleh putusan mahkamah konstitusi spanyol 38/2007, tanggal 15 februari 2007, yang memutuskan masalah konstitusionalitas fidipimpin oleh Pengadilan Tinggi Kehakiman Kepulauan Canary. Kasus ini berkaitan dengan guru re ligion Katolik, namun status hukumnya juga berlaku bagi guru agama Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perekrutan guru agama oleh pegawai negeri sipil atau administrasi publik. Mahkamah menilai bahwa bentuk rekrutmen ini sudah tepat.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: 'agama-agamayang tidakberkepentingan memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian orang-orang yang mengajarkan keyakinannya. Konstitusi Spanyol memungkinkan penilaian ini tidak hanya didasarkan pada pengetahuan dogmatis atau keterampilan pedagogis para kandidat. Adalah mungkin untuk

mempertimbangkan perilaku pribadi, sejauh kesaksian pribadi merupakan komponen yang sah dan khas dari keyakinan suatu agama com- munity, sampai pada poin t menjadi penentu dalam kesesuaian atau bakat untuk mengajar, dipahami sebagai saluran dan instrumen yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu. Teladan dan kesaksian pribadi mungkin memang merupakan alat yang secara sah dianggap penting oleh Gereja-Gereja.

Oleh karena itu, prasyarat untuk mengajarkan agama Islam adalah menjalani kehidupan yang sesuai dengan contoh dan kesaksian doktrin agama yang diajarkan, termasuk penolakan terhadap terorisme Islam dan segala jenis kekerasan dan mengadvokasikomparasi doktrin Islam dengan demokrasi (Saada & Gross, 2019) berdasarkan resolusi yang mengatur pendidikan agama Islam. Peran keteladanan yang diteladani oleh guru agama Islam baik dalam kelas maupun dalam kehidupan pribadi mereka, akan definitely membantu melawan pesan teroris Islam dan mencegah radikalisasi dan dengan demikian merupakan alat efektif dalam melawan terorisme. Oleh karena itu, guru agama Islam memiliki peran penting dalam melawan pesan teroris tersebut.

Efektivitas dari peraturan hukum yang mengatur guru agama terbatas, karena sangat sedikit guru agama Islam yang direkrut di Spanyol. Saat ini, ada sekitar 16.000 guru pendidikan agama Katolikdi sekolah umum. Komunitas Islam terus-menerus menyerukan pekerjaan guru agama Islam untuk semakin banyak siswa Muslim. Saat ini ada sekitar 290.110 siswa Muslim di sekolah-sekolah milik negara di Spanyol. Namun, hanya 55 guru agama Islam yang telahdirekrut hingga saat ini *hanya untuk sekolah dasar* 22 di Andalusia, 14 di Ceuta, 10 di Melilla, 1 di Kepulauan Canary, 3 di Negara Basque, 1 di Castile dan Leon, 1 di Madrid dan 3 di Aragon. Catalonia (82.284 siswa Muslim) belum merekrut satu pun guru, karena kelas agama Islam belum diizinkan, meskipun orang tua bersedia membayar biaya sekolah (Observatorium Andalusia 2017).

Singkatnya, 95% siswa Muslim tidak menerima pendidikan agama Islam , meskipun ada kesepakatan yang dicapai antara Negara Spanyol dan Komisi Islam Spanyol (UU 26/1992). Hampir 25 tahun setelah disahkan, undang-undang yang menerapkan kesepakatan dengan Komisi Islam Spanyol belum diterapkan Oleh karena itu di ffikultus untuk menilai e ffektifitas pendidikan agama Islam. Dalam arti sebaliknya, serangan Catalonia pada Agustus 2017 dengan jelas menunjukkan bagaimana teroris muda diradikalisasi, begitu cepat , oleh imam Ripoll (Dearden

2017), karena mereka belum pernah menerima pendidikan agama Islam sebelumnya di sekolah umum . Banyak ahli mendukung pendapat ini (Rubin, Kingsley, dan Karasz 2017). Menurut peraturan saat ini (didukung oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, seperti dalam kasus Fernandez Martinez v. Spanyol 12 Juni 2014), guru agama dipilih oleh otoritas agama , yang juga menentukan kriteria seleksi untuk menilai kesesuaian dan keterampilan mengajar kandidat. Kursus untuk mengesahkan keterampilan pedagogis yang diperlukan untuk menjadi guru agama juga dapat diselenggarakan oleh pihak berwenang. Untuk tujuan tersebut kursus untuk memberikan pedagogi Islam- keterampilan certi ficate diselenggarakan pada tahun 2015 oleh Komisi Islam Spanyol . Certifi cate ini wajib mengajarkan agama Islam di sekolah negeri dan sekolah menengah . Hal ini diberikan oleh Komisi Islam Spanyol dan certifies bahwa pemegang memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogis yang diperlukan untuk menjadi guru Islam agama. Mata kuliah ini juga harus diambil oleh islami yang sudah ada

guru agama.

Pada titik ini, penting untuk menyebutkan pasal 10.5 Perjanjian dengan Komisi Islam Spanyol (UU 26/1992). Artikel tersebut mengacu pada perjanjian antara komunitas Islam dan universitas Spanyol yang bertujuan menyediakan kursus agama Islam untuk lulusan dan mahasiswa. Perguruan tinggi negeri tentu harus didorong dan dimotivasi untuk mematuhi klausul Uu 26/1992 ini, untuk mencapai pengakuan profesional dan sosial yang diperlukan atas pendidikan Islam. Sebuah Universitas Islam juga telah didirikan, di Negara Basque, sebagai cabang dari Universitas Islam Minnesota (AS).

Pendidikan Antarbudaya Dan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan antarbudaya adalah untuk mencapai integrasi tanpa asimilasi, menghasilkan pengayaan timbal balik antara agama dan budaya yang berbeda, serta penghormatan terhadap prinsip persamaan hak. Pendidikan tidak terbatas pada penerimaan keragaman, tetapi juga harus mengembangkan nilai-nilai baru yang mempromosikan rasa saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, untuk mencegah kekerasan. Dengan kata lain, pendidikan antarbudaya sesuai dengan apa yang dipahami sebagai 'ajaran nilai-nilai'.

Ada hubungan ganda antara pendidikan antarbudaya dan pendidikan agama. Pertama, sebagai topik specific dalam subjek itu sendiri; khususnya, dialog antarumat beragama. Dan

kedua, ketika mempelajari agama sebagai fenomena budaya. Pentingnyapendidikan antarbudaya, terutama perannya dalam pencegahan, telah dipilih dalam beberapa dokumen internasional tentang terorisme. Misalnya, pasal 3 Konvensi Eropa tentang Pencegahan Terorisme, 2005, tentang kebijakan pencegahan nasional dan strategi kontra-terorisme Global Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari 8 September 2006. Kedua dokumen tersebut menyoroti pentingnya dialog antaragama. Mata pelajaran ini juga secara eksplisit disebutkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Ketentuan tentang pendidikan agama Islam untuk pendidikan menengah tahun ketiga menyatakan bahwa: 'dialo- gue antaragama: bentuk, atribut, metode, dan strategi yang berbeda. Analisis, penjelasan dan pencegahan terorisme'. Dalam bagian tentang pendidikan agama Islamn, ketentuan tersebut mencakup topik tentang agama Katolik dan Yahudi: 'Jelaskan beberapa kepausan abad kedua puluh; menganalisis dan mengevaluasi kepausan Benediktus XVI dan Fransiskus, dengan fokus pada ajaran mereka pada dialog antaragama

menganalisis perjumpaan, pengetahuan dan pemahaman antara agama Islam dan Yahudi'. Aliansi Peradaban juga dipelajari dalam bab tentang dialog antaragama. Kajian dan pengetahuan tentang dimensi budaya agama merupakan dimensi pendidikan antarbudaya . Aspek agama ini juga harus diwajibkan bagi semua siswa (Quraishi & Kamali, 2000). Subjek ini termasuk dalam ketentuan kedua Keputusan Kerajaan 1631/2006 tanggal 29 Desember 2006 (dicabut pada tahun 2013), yang menetapkanpersyaratan pengajaran minim um untuk pendidikan sekolah menengah , namun hanya opsional untuk siswa yang tidak memilih mata pelajaran pendidikan pengakuan dosa (Katolik, Protestan atau Islam). Menurut Dekrit Kerajaan ini: Subjek (*sejarah dan budaya* agama) berfokus pada *aspek non-denominasi* agama, meninggalkan referensi apa pun untuk pengalaman agama atau justifi cation, baik untuk atau melawan agama . Tujuannya adalah untuk off er siswa pandangan luas tentang pluralisme ideologis dan agama di dunia saat ini, dimulai dengan aspek-aspek yang relevan dari agama-agama dunia yang dominan dan kehadirannya sepanjang waktu dan dalam masyarakat modern, sementara tinggi- menerangi relevansi kebebasan berpikir, hati nurani dan agama sebagai elemen sentral untuk coex- istence".

Menurut Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pendidikan tentang pengalaman beragama harus tetap netral dan objektif, sebagaimana ditetapkan dalam putusan 29 Juni 2009 (*Folgerø dan Lainnya v. Norwegia*) dan tanggal 9 Oktober 2007 (*Hasan Zengin v. Turki)* . *Sejarah dan budaya kurikulum agama* meliputi: 'Islam; Mohammed; Fitri Islam yang

fikih; Al-Qur'an dan Hukum Islam; Kalender dan hari libur Islam; Tempat-tempat suci; evolusi dan perluasan Islam; Islam hari ini'. Standar kinerja meliputi yang berikut: 'Jelaskan hubungan antara Yudaisme, Kristen dan Islam, dengan fokus pada tradi- tions yang mereka bagikan dan fitur khas masing-masing'. Eseniensi historis koeksistensi ketiga agama ini di Al-Andalus adalah titik awal yang baik dalam isi subjek ini. Namun, Undang-Undang Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 2013 saat ini menghapus subjek tentang pengalaman keagamaan (sejarah dan budaya agama). Penghapusan ini bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Panduan Toledo tentang pengajaran agama dan kepercayaan di sekolah-sekolah negeri , yang dikeluarkan oleh Dewan Penasihat Panel Pakar Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dari Eropa Office for Democratic Institutions and Human Rights (Sgueo, 2020).

Singkatnya, subjek (sejarah dan budaya agama) sesuai dengan apa yang disebut Häberle (2000) sebagai 'tujuan pendidikan', yang harus diperlukan dalam semua sistem pendidikan sebagai catatan final, topik antarbudaya yang termasuk dalam mata pelajaran pendidikan agama sangat penting untuk mencegah islamofobia. Dengan kata lain: 'Mengingat bahwa intoleransi dan diskriminasi terhadap Muslim biasanya diakibatkan oleh prasangka, stereotip, dan pengetahuan yang tidak memadai tentang Islam dan budaya Islam, pendidikan dapat memainkan peran utama dalam mempromosikan perubahan sikap menuju pemahaman yang lebih baik dan saling menghormati. Untuk menghormati orang lain, perlu mengenal mereka. Reformasi pendidikan berikutnya di Spanyol harus mencakup subjek pada aspek budaya agama different sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa (Org et al., 2004).

KESIMPULAN

Lebih dari 10 tahun yang lalu, Komisi Penyelidikan Parlemen Spanyol terhadap serangan teroris 11-M tahun 2004 dengan suara bulat menyetujui Laporan Rekomendasi (Official Journal of the Spanish Parliament 2005a). Di antara rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: 'e) Agama Islam harus sesuai dengan pendidikan sebagai salah satu pilihan yang tersedia bagi manusia yang hidup dalam demokrasi' (Official Journal of the Spanish Parliament 2005b).

Pendekatan pendidikan yang tepat untuk agama Islam akan mencakup dua faktor kunci: pendidikan Islam di sekolah-sekolah negeri dan dimasukkannya agama Islam dalam subjek pengalaman agama sebagai fakta budaya (untungnya hilang dari sistem pendidikan

Spanyol sejak 2013). Tulisan ini telah menunjukkan bahwa kaum muda Muslim perlu belajar lebih banyak tentang agama 'mereka sendiri' di sekolah umum dan bahwa semua siswa perlu memiliki pendidikan agama non-pengakuan multi-agama (intercultural educa- tion) untuk saling memahami. Pentingnya pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan negara untuk pencegahan terorisme disorot oleh para ahli dalam penanggulangan terorisme dan internasional yang ada dokumentasi. Laporan Pelapor Khusus tentang promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saat melawan terorisme, Misi Khusus ke Spanyol pada 15 Desember 2008, mengatakan: 'Pelapor Khusus mencatat pelaksanaan pendidikan program-program yang diarahkan untuk mendukung integrasi anak-anak imigran, terutama bahasa Spanyol dan Arab , dan melalui pengajaran agama-agama minoritas di sekolah-sekolah'. Gagasan itu telah dimasukkan dalam resolusi yang mengatur kurikulum pendidikan subjek agama Islam di Spanyol.(Croissant & Barlow, 2007)

Mengapa pendidikan agama Islam harus diajarkan di sekolah umum dan bukan di madrasah? Tulisan tentang regulasi pendidikan agama Islam di Spanyol ini jelas bertentangan dengan bahwa jauh lebih baik mengajarkan pendidikan agama Islam di sekolah umum karena Pemerintah mengontrol isi mata pelajaran ini (fight melawan terorisme dan radikalisasi kekerasan) dan guru agama Islam direkrut oleh Pemerintah, sehingga berkontribusi pada fight melawan terorisme Islam dan radikalisasi kekerasan melalui pendidikan agama Islamic, berkat pengawasan langsung oleh Pemerintah, sebagaimana disahkan oleh Hukum Spanyol. Pendidikan agama Islam yang diajarkan di madrasah atau online berada di luar kendali Pemerintah, yang paling banyak hanya memiliki kendali posteriori.

Melawan terorisme adalah masalah Negara. Semua otoritas publik dan administrasi publik, memang semua warga negara, harus berkomitmen dan bersatu melawan terorisme. Resolusi Spanyol tentang kurikulum pendidikan agama Islam telah menciptakanstruktur dasar yang diperlukan untuk melakukan kebijakan pencegahan untuk radikalisasikekerasan. Serangan Catalonia, pada Agustus 2017, menerjangnya. Langkah selanjutnya adalah menjadikan pendidikan ini efektifdengan merekrut guru, terutama di tingkat regional. Penting juga untuk merekrut guru untuk pendidikan sekolah menengah dan atas, karena siswa pada tingkat tersebut berada pada usia kultus diffi dan mengembangkan kepribadian mereka. Pada jenjang pendidikan ini, sangat penting untuk segera memulai pendidikan agama Islam, karena merupakan elemen significant dalam pencegahan terorisme, seperti yang dijelaskan dalam tulisan ini.

Tidak ada paksaan dalam beragama' (Surah 2, ayat 256 dari Al-Qur'an). Biarlah ayat Al-Qur'an ini menjadi salah satu pilar narasi tandingan ini. Biarlah itu terdengar di sekolah-sekolah, di jalanan dan di mana-mana. Namun yang lebih penting lagi adalah umat Islam menyuarakan pesan tersebut. Menurut fatwa yang dinyatakan melawan Osama Bin Laden oleh Komisi Islam Spanyol, (17 Maret 2005): setiap Muslim adalah untuk aktif melawan terorisme'. Sebenarnya, Islam sangat beragam tetapi, ada Islam yang damai , sekuler dan demokratis yang kompatibel dengan hak asasi manusia. Pendidikan agama Islam di sekolah umum harus mengajarkan bentuk Islam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Croissant, A., & Barlow, D. (2007). Following the money trail: Terrorist financing and government responses in Southeast Asia. *Studies in Conflict and Terrorism*, *30*(2), 131–156. https://doi.org/10.1080/10576100600959721

Franken, L. (2019). Coping with Diversity in Religious Education: an Overview. *Taylor & Francis*, *45*(4), 674–691. https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1409177

Kosmynka, S. (2021). The Role of Moroccan Salafist Radicalism in Creating a Threat to Spain's Security. *Politeja*, *13*(3 (42)), 165–188. https://doi.org/10.12797/politeja.13.2016.42.11

Org, L., Religiosa, L., Religiosas, E., & Iglesias, L. (2004). *LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS :* 311–347.

Pape, R. A. (2003). The Strategic Logic of Suicide Terrorism. *American Political Science Review*, *97*(3), 343–361. https://doi.org/10.1017/S000305540300073X

Quraishi, A., & Kamali, M. H. (2000). Principles of Islamic Jurisprudence. *Journal of Law and Religion*, *15*(1/2), 385. https://doi.org/10.2307/1051529

Saada, N., & Gross, Z. (2019). The experiences of Arab teachers in Jewish schools in Israel. *Teaching and Teacher Education*, *79*(xxxx), 198–207. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.11.012

Sgueo, G. (2020). *A selection of civic initiatives The practice of democracy* (Issue June).

Wainscott, A. M. (2015). Defending Islamic education: War on Terror discourse and religious education in twenty-first-century Morocco. *Journal of North African Studies*, *20*(4), 635–653. https://doi.org/10.1080/13629387.2015.1041108